



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur Periode 2018 – 2022

Clarisa Sukmaning Ati , Imam Baidlowi , Nur Ainiyah , M. Bahril Ilmiddaviq

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Mjapahit

email: claisasukma5@gmail.com

Abstract. *The emergence of the Covid-19 virus in 2019 caused an economic crisis for all regions in Indonesia. So an appeal was issued to prevent the occurrence of Covid-19. However, this implementation has affected various sectors, especially the economic sector. East Java Province is one of the provinces affected by the Covid-19 pandemic, so that the economy in East Java Province has experienced a decline. The purpose of this study was to determine the effect of Regional Original Revenue and Capital Expenditures on the Financial Performance of the Level II Regional Government of East Java Province for the 2018-2022 Period. The research methodology uses a quantitative research methodology, the sample used uses saturated sampling. Data analysis in this study used descriptive statistical analysis with Patrial Least Squares (PLS) software. The results of this study are that regional original income has a significant effect on local government financial performance and capital expenditure has no significant effect on local government financial performance.*

Keywords : *Local Government Original Revenue, Capital Expenditure, Local Government Financial Performance*

Abstrak . Munculnya virus Covid-19 pada tahun 2019 menyebabkan krisis ekonomi bagi seluruh daerah di Indonesia. Sehingga dikeluarkan himbauan untuk mencegah terjadinya Covid-19. Namun dengan adanya pemberlakuan tersebut berpengaruh terhadap berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terdampak dari pandemi Covid-19, sehingga perekonomian di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tingkat II di Provinsi Jawa Timur periode 2018-2022. Metodologi penelitian menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, sampel yang digunakan menggunakan sampling jenuh. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan software Patrial Least Squares (PLS). Hasil dari penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dan peran pemerintah pusat saling terkait dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan dan menyusun pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan undang-undang yang relevan. Penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Melalui laporan keuangan daerah, yang berfungsi sebagai kajian kinerja dan tolok ukur bagi pemerintah daerah, untuk menentukan kemajuan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Halim (2007), Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengkaji kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti belanja daerah,

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 12, 2023; Accepted Agustus 22, 2023

* Clarisa Sukmaning Ati, claisasukma5@gmail.com

penerimaan daerah, tingkat kekayaan daerah. Semestinya semakin tinggi penerimaan pendapatan daerah maka semakin besar pula kemampuan keuangan yang dimiliki daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Namun munculnya virus Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan krisis ekonomi bagi seluruh daerah yang ada di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, dengan himbauan sosial distancing hingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di setiap daerah. Namun dengan adanya pemberlakuan tersebut berpengaruh terhadap berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terdampak dari pandemi Covid-19, sehingga perekonomian di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan. Beberapa upaya kebijakan sosial dan ekonomi yang diambil oleh Provinsi Jawa Timur yaitu melakukan realokasi dan refocusing APBD Jawa Timur untuk penanganan Covid-19 melalui efisiensi belanja daerah (Lutfiyah, 2022).

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2021

TAHUN	PENDAPATAN DAERAH	BELANJA DAERAH
2018	31.939.187.379.442,58	30.662.093.021.869,82
2019	33.455.209.327.986,57	33.967.109.632.815,13
2020	31.631.024.771.618,29	32.286.757.637.609,27
2021	34.280.709.120.323,71	33.852.938.529.603,57

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur dan data diolah penulis, 2023

dari tahun 2018-2021 Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi yang disebabkan adanya Covid-19. Sehingga penerimaan daerah dan Belanja daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Tabel 2 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2017- 2021

No	Keterangan	Provinsi Jawa Timur				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Anggaran	15.850.715.963.543,10	16.575.987.295.655,40	18.212.437.333.663,50	15.448.832.795.589,00	17.124.366.352.581,00
2.	Realisasi	17.324.177.664.424,20	18.531.062.021.823,30	19.327.125.485.405,90	17.950.996.508.801,00	18.935.885.925.145,60

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dan data diolah penulis, 2023

berdasarkan fenomena pada Provinsi Jawa Timur tahun 2018 – 2021 Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut melebihi dari target anggaran meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 7% dari 19,327 triliun menjadi 17,950 triliun.

Selain Pendapatan Asli Daerah, belanja daerah dapat berdampak pada keberhasilan kinerja keuangan daerah. Belanja daerah dibedakan menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Linnya. Belanja modal adalah belanja daerah yang manfaatnya melampaui 1 tahun anggaran dan menambah aset atau aset daerah. Berikut adalah tabel realisasi belanja modal pemerintah Provinsi Jawa Timur :

Tabel 3 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur T.A 2018 – 2021

No	Provinsi	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Anggaran	3.385.425.612.437,00	3.391.075.425.108,00	3.279.042.817.256,81	2.284.845.579.345,04	2.418.101.833.529,23
2.	Realisasi	3.090.055.683.753,90	2.840.552.249.709,06	2.770.973.973.023,11	1.904.556.949.359,00	1.969.920.805.388,69

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dan data diolah penulis, 2023

berdasarkan data diatas realisasi belanja modal pada pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 – 2021 kurang dari target anggaran. Pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 realisasi belanja

modal mengalami penurunan cukup drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya meskipun pada tahun 2021 realisasi belanja modal ,mengalami sedikit kenaikan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratnasari & Meirini (2022), Kinerja keuangan tidak dapat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah tetapi kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara negatif signifikan oleh dana perimbangan dan SILPA, serta kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara positif signifikan oleh belanja modal. Hal ini tidak sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningrat (2019), bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur Periode 2018 – 2022.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusala masalah pada penelitian ini yaitu 1) Apakah terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur Periode 2018 – 2022 ?, 2) Apakah terdapat Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur Periode 2018 – 2022 ?. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya maka tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur Periode 2018 – 2022. 2) Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur Periode 2018 – 2022.

Tingginya kemampuan daerah dalam mengelola potensi daerah dapat menghasilkan tingkat pendapatan asli daerah. Hal ini dapat berpengaruh terhadap keputusan daerah serta mengurangi ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah karena dengan kemandirian daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sehingga dapat berdampak pada kinerja keuangan daerah. Untuk menunjang kemandirian suatu daerah maka diperlukan sistem distribusi yang adil dan merata, yang bertujuan untuk pemerataan distribusi pendapatan dan pembangunan suatu daerah. Teori distribusi yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat agar dapat tersalurnya tujuan secara merata. Selain itu fungsi dari distribusi untuk mengusahakan pemerataan distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan.

Hasil dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Antari & Sedana (2018), Menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrat (2019), bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Namun penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian Ratnasari & Meirini (2022), yang mengungkapkan bahwa Kinerja keuangan tidak dapat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. Berdasarkan landasan Teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis pertama dalam penelitian ini menggunakan arah hipotesis tidak berarah karena hasil penelitian sebelumnya bertentangan. Maka hipotesis dapat ditulis tanpa arah sebagai berikut ini :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Belanja modal memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun, yang dapat menambah aset ataupun kekayaan. Aset tetap atau aset lainnya pada belanja modal digunakan untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari dan bukan untuk dijual. Belanja modal juga didasarkan pada kebutuhan daerah masing-masing terutama pada sarana dan prasarana. Penggunaan belanja modal

ditujukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan ataupun fasilitas publik dan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Dengan belanja modal maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gedung, pembangunan atau perbaikan jalan, irigasi, jaringan dan sebagainya maka dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, dengan meningkatnya ekonomi dapat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pelayanan pada publik. Belanja modal dikatakan berhasil atau bermanfaat apabila tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga dan tepat jumlah. Hal ini sejalan dengan teori distribusi yaitu dengan adanya pemerataan belanja modal yang merata, maka dapat memberikan manfaat ekonomi baik mikro maupun makro bagi masyarakat khususnya pada pemerintahan daerah dan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil Penelitian Ratnasari & Meirini (2022), bahwa belanja modal berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kinerja keuangan. Artinya, ketika terjadi belanja modal, maka pengeluaran yang dilakukan semakin bertambah sehingga penambahan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin merata dan tepat. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Antari & Sedana (2018), yang mengemukakan bahwa Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan landasan Teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis kedua dalam penelitian ini menggunakan arah hipotesis tidak berarah karena hasil penelitian sebelumnya bertentangan. Maka hipotesis dapat ditulis tanpa arah sebagai berikut ini :

H2 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

B. KAJIAN LITERATUR

1. Teori Distribusi

Menurut Sukirno (2006), distribusi pendapatan yaitu suatu hal yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap masyarakat, Teori distribusi yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat agar dapat tersalurkan tujuan secara merata yang berfungsi untuk mengusahakan pemerataan distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Teori ini sesuai dengan variabel pada penelitian ini karena dengan adanya teori distribusi ini maka pendapatan daerah dan belanja modal dapat terdistribusi dengan baik sehingga mempercepat pemerataan pendapatan dan pembangunan daerah dan dapat berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintah daerah yang berlandaskan dengan asas otonomi daerah dan dijalankan sesuai dengan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang pada Undang – undang Dasar 1945. Pengertian Pemerintahan Daerah menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Pusat, 2014).

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah daerah yaitu ukuran atau tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah menjalankan dan melakukan pengelolaan keuangan dengan baik selama satu periode. Tujuan pengukuran kinerja keuangan adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah, karena

pengukuran kinerja dapat membantu pemerintah meningkatkan perhatian pada tujuan program kerja, mewujudkan akuntabilitas publik, dan meningkatkan komunikasi kelembagaan. Menurut Halim (2002), Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan menganalisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meliputi :

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah : digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi}}$$

dan Pinjaman

semakin tinggi rasio kemandirian menunjukkan bahwa semakin rendah ketergantungan pada pemerintah pusat

- b. Rasio Efisiensi : digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara keluaran atau hasil yang dihasilkan terhadap pemasukan yang digunakan

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$$

- c. Rasio Efektivitas : digunakan untuk melihat berhasil atau tidaknya suatu instansi dalam mencapai tujuannya. Jika suatu instansi berhasil dalam mencapai tujuan hal ini dapat dikatakan suatu instansi tersebut berjalan dengan efektif.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}}$$

berdasarkan potensi riil daerah

Semakin tinggi rasio efektifitas maka dapat menunjukkan kemampuan daerah yang sangat baik

- d. Rasio Pertumbuhan : digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi pendapatan daerah serta meningkatkan keberhasilan yang dicapai secara terus menerus.

$$\text{Presentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun P} - \text{PAD tahun P-1}}{\text{PAD tahun P-1}} \times 100\%$$

Keterangan : Tahun P = tahun yang dihitung, P-1 = tahun sebelumnya

4. Pendapatan Asli Daerah

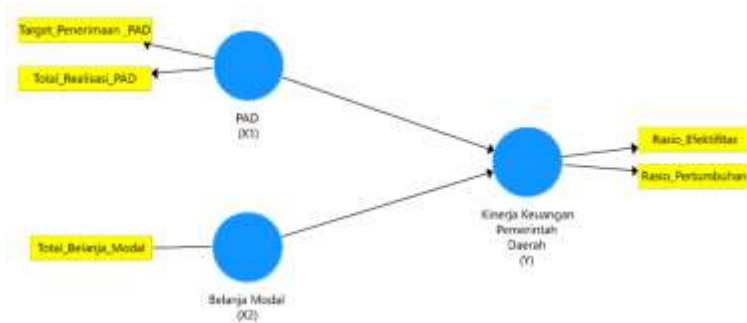
Pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan pendapatan daerah dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan“ (Pusat, 2004).). Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil pengandaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

5. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun anggaran dapat menambah aset ataupun kekayaan pemerintah daerah. Jenis- jenis belanja modal meliputi : Belanja tanah, Belanja peralatan dan mesin, Belanja Gedung dan bangunan, Belanja Jalan , irigasi dan jaringan , Belanja Modal fisik lainnya, Belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Desain Penelitian

Populasi pada penelitian ini yaitu Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan dengan kurun waktu 5 tahun dan diharapkan *output* dari penelitian ini sesuai dengan kondisi yang terjadi di Jawa Timur. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *sampling jenuh*. Lokasi penelitian pada penelitian adalah pemerintah daerah tingkat II Provinsi Jawa Timur mencakup Seluruh Kabupaten dan Kota. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Analisis Statistik Deskriptif dan *Partial Least Square* (PLS). Definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Operasional variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala Data
Variabel Dependen atau Variabel Terikat (Y)			
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Kinerja Keuangan Pemerintah daerah yaitu ukuran atau tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah menjalankan dan melakukan pengelolaan keuangan dengan baik selama satu periode.	Rasio Pertumbuhan = $\frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p - 1}{\text{PAD tahun } p - 1} \times 100\%$ Keterangan : Tahun p = tahun yang dihitung $p - 1$ = tahun sebelumnya Rasio Efektivitas : $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$	Rasio
Variabel Independen atau Variabel Bebas (X)			
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Paendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber ekonomi daerah.	Total Target PAD dan Total Realisasi PAD setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022	Nominal
Belanja Modal (X2)	Belanja Modal merupakan pengeluaran yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun anggaran dapat menambah aset ataupun kekayaan pemerintah daerah.	Total Belanja Modal setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022	Nominal

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 5. *Path Coefficients*

Hipotesis	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keterangan
X1 -> Y	-0,225	-0,227	0,098	2,295	0,022	Signifikan
X2 -> Y	0,127	0,128	0,094	1,360	0,175	Tidak Signifikan

Sumber : Data diolah peneliti, *SmartPLS* 3.0, 2023

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Karena hasil dari t-statistik $> 1,96$ yaitu menunjukkan nilai 2,295 dan p value $< 0,05$ yaitu 0,022. Artinya Pendapatan Asli daerah Provinsi Jawa Timur memiliki nilai efektifitas sehingga dapat tercapainya tujuan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan tercapainya tujuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur hal ini menandakan bahwa kinerja keuangan pada pemerintah Provinsi Jawa Timur baik. Selain itu semakin tinggi tingkat efektifitasnya maka dapat menunjukkan kemampuan daerah yang sangat baik. Meningkatnya pendapatan asli daerah menyebabkan tingginya kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kegiatan pada daerahnya. Berdasarkan teori distribusi, pendapatan daerah yang dapat terdistribusi dengan baik dapat mempercepat pemerataan pendapatan sehingga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil pada penelitian didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Berti Indah Sari & Halmawati pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. dan penelitian yang dilakukan oleh Cok Istri Nilam Kencana Ningrat & Ni Luh Supadmi tahun 2019 yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena t-statistik menunjuka hasil 1,360 hal ini tidak memenuhi kriteria hipotesis yang telah di tentukan karena dapat dikatakan signifikan apabila t-statistik menunjukkan nilai > 1.96 . selain itu hasil p-value menunjukkan nilai > 0.05 yaitu 0,175. Artinya belanja modal yang dikeluarkan atau yang dipergunakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022 belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap penerimaan pendapatan asli daerah sehingga belum mampu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Selain itu belanja modal yang diserap belum merata sehingga hasil pada penelitian ini tidak mendukung dengan teori distribusi yang digunakan pada penelitian ini.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Djuniar & Zuraida (2018) yang menunjukkan hasil bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dan juga penelitian yang dilakukan oleh Nanda Dipa Prastiwi dan Andri Waskita Aji tahun 2020 yang menyatakan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

E. KESIMPULAN

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya Pendapatan Asli daerah Provinsi Jawa Timur memiliki nilai efektifitas sehingga dapat tercapainya tujuan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan tercapainya tujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur hal ini menandakan bahwa Kinerja Keuangan pada

Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik. Selain itu semakin tinggi tingkat efektifitasnya maka dapat menunjukkan kemampuan daerah yang sangat baik. Meningkatnya pendapatan asli daerah menyebabkan tingginya kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kegiatan pada daerahnya.

2. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Artinya belanja modal yang dikeluarkan atau yang dipergunakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022 belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap penerimaan pendapatan asli daerah sehingga belum mampu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

F. REFERENCES

- Lutfiyah, Y. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/yenilutfiyah0716/624c8057bb44863b73275232/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-di-provinsi-jawa-timur>
- Pusat, P. (2004). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH*. 8(4), 104–110.
- Pusat, P. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*. 139.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- BPKAD Provinsi Jawa Timur. (2022). *Alhamdulillah Realisasi Pendapatan Pemprov Jatim Tertinggi Nasional, Realisasi Belanja Nomor Tiga Se Indonesia*. <https://bpkad.jatimprov.go.id/article/alhamdulillah-realisasi-pendapatan-pemprov-jatim-tertinggi-nasional-realisasi-belanja-nomor-tiga-se-indonesia>
- Chin, W. W. (1998). *Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling, Modern Methods for Business Research*.
- Djuniar, L., & Zuraida, I. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN. *BALANCE Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 445. <https://doi.org/10.32502/jab.v3i2.1447>
- Ghozali Imam. (2021). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris* (3 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2008a). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2008b). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Hartanto, J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman - pengalaman (Edisi 6)*.
- Ningrat, C. I. N. K. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Jurnal Akuntansi*, Vol. 29 No, 683–697.
- Ningrat, C. I. N. K. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Jurnal Akuntansi*, Vol. 29 No, 683–697.

Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1189. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i05.p06>

Sugiono. (2018). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.